

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI *FEMINIST* MEKSIKO

2.1. Perspektif *Foreign Policy* di Meksiko

Kebijakan luar negeri Meksiko sejak awal 1990-an hingga saat ini menampilkan transformasi strategis yang berfokus pada diversifikasi kemitraan dan penguatan posisi negara di berbagai forum internasional. Secara historis, Meksiko menganut doktrin non-intervensi dan penghormatan kedaulatan, yang terejawantah melalui keaktifannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), dan Konferensi Tingkat Tinggi Amerika Latin dan Karibia (CELAC) (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2020). Namun, seiring dinamika geopolitik dan tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi massal, serta ketegangan perdagangan. Meksiko mengadopsi pendekatan pragmatis yang menekankan kerjasama lintas-regional dan lintas-fungsi. Misalnya, selain memperkuat trilateralisme di Amerika Utara melalui NAFTA (sekarang USMCA), pemerintah Meksiko juga menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi dengan Uni Eropa yang diperluas pada 2000, serta perjanjian serupa dengan Jepang (2005) dan Korea Selatan (2016), dengan tujuan meningkatkan konektivitas ekonomi dan diversifikasi pasar ekspor (World Trade Organization, 2021). Di level multilateral, Meksiko konsisten mengusung isu hak asasi manusia, gender, dan keberlanjutan dalam resolusi PBB—termasuk penolakan terhadap hukuman mati dan desakan peningkatan komitmen lingkungan dalam Kesepakatan Paris—sebagai bagian dari diplomasi nilai

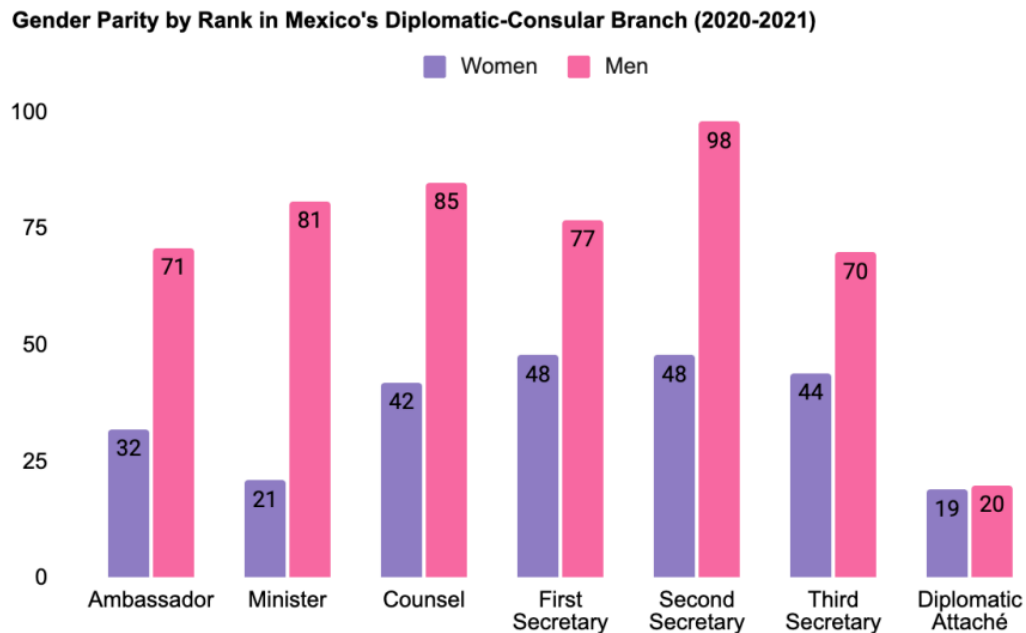
(Espinosa, 2019). Lebih lanjut, upaya memperluas dialog dengan negara-negara Global South—melalui mekanisme seperti Aliansi Pasifik dan konferensi trilateral Meksiko–Brazil–Argentina—memperkuat bargaining power Meksiko dalam negosiasi internasional, sekaligus menegaskan peran negara sebagai jembatan antara dunia maju dan berkembang (Castañeda, 2022).

Dalam kerangka komitmen terhadap nilai-nilai progresif, pada 2020 Meksiko secara resmi meluncurkan Kebijakan Luar Negeri Feminis (Feminist Foreign Policy, FFP), menjadi pelopor di Amerika Latin dengan mengadopsi model yang pertama kali dirintis oleh Swedia pada 2014 (Government Offices of Sweden, 2014). Kebijakan ini menempatkan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan perspektif interseksional sebagai lensa utama dalam setiap tahap perumusan dan implementasi diplomasi (UN Women, 2021). FFP Meksiko mengusung tiga pilar utama yakni hak (rights), representasi (representation), dan sumber daya (resources) serta menerapkan analisis gender wajib pada seluruh perjanjian bilateral dan multilateral, termasuk peninjauan anggaran Kementerian Luar Negeri untuk memprioritaskan program pemberdayaan perempuan (Gobierno de México, 2020). Upaya ini juga mencakup pelatihan intensif bagi diplomat, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, dan audit kebijakan secara berkala dengan indikator kuantitatif untuk mengukur dampak terhadap kesetaraan gender. Dengan demikian, FFP bukan hanya simbol retorika, melainkan instrumen transformatif yang menjembatani agenda domestik—seperti penurunan kekerasan berbasis gender—dengan kepentingan global, misalnya dalam diplomasi iklim dan penanganan krisis kemanusiaan, sehingga Meksiko

dapat berperan sebagai advokat perubahan sosial di panggung dunia (Breuning, 2007; Gobierno de México, 2020).

2.1.1 *Pengaruh FFP dalam decision making process Meksiko (500)*

Meksiko mengadopsi Feminist Foreign Policy (FFP) di bawah kepemimpinan Presiden Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sebagai respons terhadap tantangan dan dinamika global yang menuntut adanya inklusivitas dan kesetaraan gender dan pada periode 2018–2023, AMLO melihat bahwa pendekatan tradisional dalam diplomasi tidak lagi memadai untuk mengatasi isu-isu global seperti ketidaksetaraan gender dan pelanggaran hak asasi perempuan (UN Women, 2021). Dalam konteks ini, FFP dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat posisi Meksiko di panggung internasional serta untuk menegaskan nilai-nilai progresif yang dapat menarik simpati dan dukungan dari komunitas global. Selain itu, AMLO meyakini bahwa dengan mengintegrasikan perspektif feminis, proses pengambilan keputusan tidak hanya lebih inklusif, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya perempuan (Gobierno de México, 2020; IACHR, 2019).

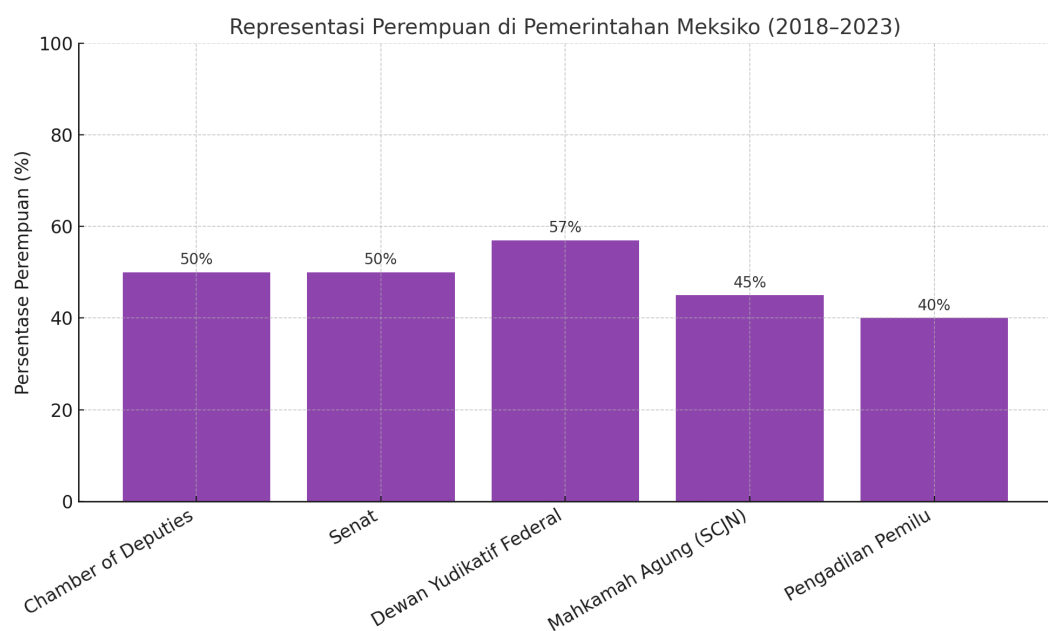


sumber: (SRE, 2024)

Gambar 2.1 Kesetaraan Gender di Cabang Diplomatik-Konsuler Meksiko
Pada Tahun 2020 - 2021

Dalam implementasinya, pengambilan keputusan pemerintah Meksiko mengalami beberapa perubahan signifikan. Pertama, peningkatan representasi perempuan dalam posisi strategis baik di dalam kementerian maupun misi diplomatik luar negeri menjadi prioritas, sehingga memastikan setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan dimensi gender. Kedua, perspektif gender diintegrasikan ke dalam analisis kebijakan melalui kajian dampak gender (gender impact assessment) yang rutin dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Ketiga, alokasi sumber daya untuk program-program pemberdayaan perempuan diperkuat, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan

kesetaraan struktural dalam proses diplomasi. Langkah-langkah tersebut tidak hanya memperkuat kredibilitas Meksiko di mata komunitas internasional, tetapi juga mengoptimalkan efektivitas kebijakan luar negeri dengan memasukkan keadilan sosial sebagai salah satu nilai utamanya (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2021).



sumber: (SRE, 2024)

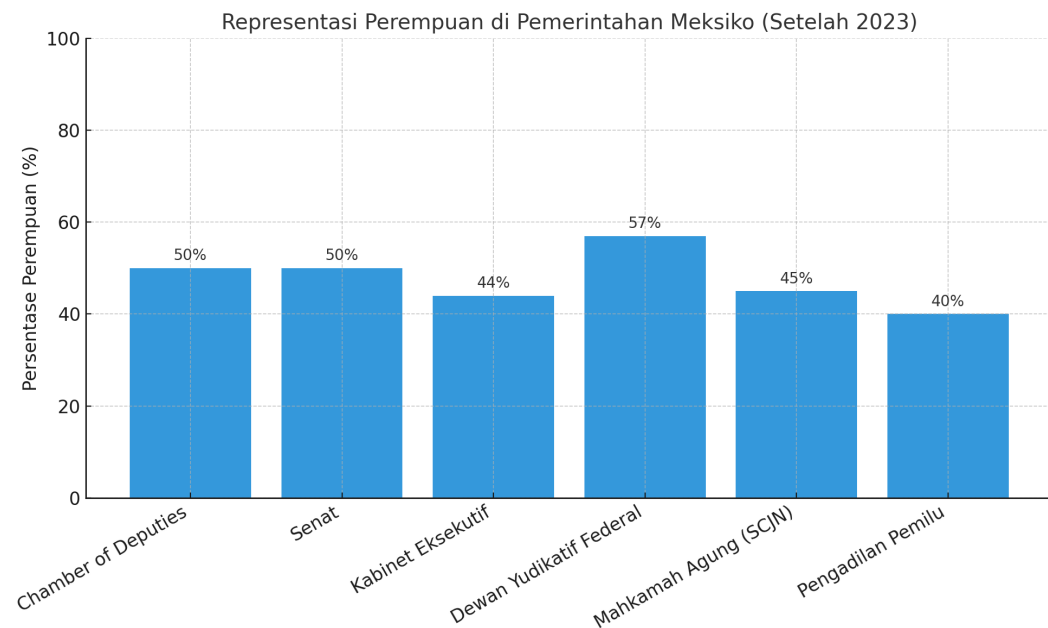
Gambar 2.2 Representasi Perempuan pada cabang Legislatif dan Yudikatif pada tahun 2018 - 2023

Selama periode 2018 hingga 2023, Meksiko menunjukkan kemajuan signifikan dalam mencapai kesetaraan gender dalam struktur pemerintahan, terutama pada cabang legislatif dan yudikatif. Hal ini merupakan hasil dari reformasi konstitusional “*Paridad en Todo*” yang disahkan pada tahun 2019, yang

mewajibkan representasi setara antara laki-laki dan perempuan di semua lembaga negara, baik di tingkat federal maupun negara bagian (Bregel, 2024).

Di tingkat legislatif, representasi perempuan di *Chamber of Deputies* mencapai 48 % pada awal masa jabatan AMLO (2018), dan meningkat hingga mencapai 50 % pada pemilu legislatif tahun 2021, yang menempatkan 250 perempuan dari total 500 kursi (Inter-Parliamentary Union [IPU], 2023). Komposisi serupa juga terlihat di Senat, di mana perempuan menempati sekitar 49 % hingga 50 % dari total 128 kursi (U.S. Congressional Research Service, 2022). Bahkan, posisi-posisi strategis dalam komisi legislatif, seperti Komisi Kesetaraan Gender dan Komisi Hak Asasi Manusia, juga dipimpin oleh perempuan (IPU, 2023). Capaian ini menempatkan Meksiko sebagai salah satu negara dengan representasi legislatif perempuan tertinggi di dunia, sejajar dengan negara-negara Skandinavia (UN Women, 2023).

Perkembangan positif ini juga tercermin di lembaga yudikatif. Berdasarkan data per Juni 2024, Dewan Yudikatif Federal (*Consejo de la Judicatura Federal*) memiliki komposisi 57 % anggota perempuan, menjadikannya lembaga yudisial dengan tingkat representasi gender tertinggi (Consejo de la Judicatura Federal, 2024). Mahkamah Agung (*Suprema Corte de Justicia de la Nación*) terdiri dari 11 hakim, di mana 5 di antaranya adalah perempuan (sekitar 45 %). Sementara itu, Pengadilan Pemilu (*Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*) menunjukkan komposisi 40 % perempuan dari total lima kursi hakim (SCJN, 2024).



sumber: (IPU, 2024)

Gambar 2.3 Representasi Perempuan pada cabang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif setelah tahun 2023

Sebagai kelanjutan dari capaian representasi perempuan pada masa pemerintahan Presiden Andrés Manuel López Obrador (2018–2023), data pasca-2023 menunjukkan bahwa Meksiko mempertahankan dan bahkan dalam beberapa aspek memperkuat posisi politik perempuan di tiga cabang pemerintahan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan grafik dan data terbaru, *Chamber of Deputies* dan Senat mempertahankan komposisi paritas, masing-masing dengan 50 % keterwakilan perempuan (Inter-Parliamentary Union [IPU], 2023). Hal ini merefleksikan keberlanjutan implementasi prinsip *paridad en todo* yang telah menjadi bagian dari kerangka konstitusional sejak 2019 (Bregel, 2024).

Pada cabang eksekutif, meskipun tidak sepenuhnya setara, keterwakilan perempuan dalam kabinet federal mencapai sekitar 44 %, yang menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan era sebelum reformasi gender di institusi eksekutif (CEPALSTAT, 2023). Posisi strategis seperti Menteri Dalam Negeri, Keamanan, dan Energi masih dipegang oleh tokoh perempuan, termasuk dalam masa transisi awal pemerintahan Claudia Sheinbaum, presiden perempuan pertama Meksiko (Wilson Center, 2024).

Di sektor yudikatif, terdapat perkembangan positif dengan Dewan Yudikatif Federal yang kini diisi oleh 57 % perempuan, menjadikannya lembaga negara dengan tingkat representasi perempuan tertinggi (Consejo de la Judicatura Federal, 2024). Sementara itu, Mahkamah Agung tetap mempertahankan representasi perempuan sebesar 45 %, dan Pengadilan Pemilu berada pada level 40 % (SCJN, 2024). Meskipun belum seluruhnya mencapai paritas, angka ini merepresentasikan komitmen kelembagaan terhadap kesetaraan gender yang semakin mengakar.

Jika dibandingkan dengan periode 2018–2023, capaian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan awal reformasi representasi perempuan tidak bersifat sementara, melainkan terus berkembang menjadi bagian dari tata kelola politik yang lebih inklusif dan berkesinambungan. Secara politis, kondisi ini juga memberikan legitimasi domestik yang kuat bagi pelaksanaan *Feminist Foreign Policy* Meksiko di level internasional, karena keberpihakan terhadap

perempuan di dalam negeri tercermin melalui struktur dan pengambilan keputusan institusional negara (UN Women, 2023).

2.1.2 Dinamika *Feminist Foreign Policy Implementation* di Meksiko bagaimana dari tahun 2018-2023 (500)

Sejak tahun 2018, Meksiko telah menunjukkan komitmen progresif dalam menerapkan FFP melalui serangkaian langkah strategis yang mencerminkan penyesuaian kebijakan luar negeri dengan nilai-nilai kesetaraan gender dan pada tahun 2020, pemerintah secara resmi mengumumkan adopsi FFP, yang kemudian diikuti dengan berbagai inisiatif untuk meningkatkan representasi perempuan dalam diplomasi dan pengambilan keputusan di tingkat internasional. Selama masa jabatan AMLO, Meksiko secara konsisten berpartisipasi dalam forum-forum global yang menitikberatkan isu-isu gender, serta memperkuat kerjasama bilateral dengan negara-negara yang juga mengusung agenda serupa (Gobierno de México, 2020; UN Women, 2021).

Secara kronologis, beberapa keputusan strategis yang menonjol antara lain:

No	Tanggal	Important Event (Decision Making)	Impact
	1 Desember 2018	AMLO resmi menjabat Presiden Meksiko	Membuka ruang bagi reformasi kebijakan luar negeri yang lebih progresif meski AMLO cenderung konservatif dalam kebijakan gender domestik (Runyan, 2024).

	September 2019	Menlu Ebrard umumkan Meksiko akan adopsi Feminist Foreign Policy (FFP)	Menjadikan Meksiko pelopor FFP di Global South, memperkuat posisi moral dan diplomatik dalam isu kesetaraan gender (Zhukova et al., 2022).
	Januari 2020	Peluncuran resmi FFP oleh Kementerian Luar Negeri	Memicu reformasi internal: pelatihan perspektif gender untuk diplomat dan pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan luar negeri—meningkatkan citra global meski kritik atas kesenjangan praktik domestik tetap muncul (Delgado, 2020).
	Januari 2021	Peluncuran Rencana Aksi Nasional (NAP) 1325 untuk Women, Peace, and Security (WPS)	Menegaskan komitmen pada agenda WPS, mendorong inklusi perempuan dalam operasi penjaga perdamaian dan kebijakan pertahanan nasional (GNWP, 2021).
	2021–2022	Meksiko menjadi anggota tidak tetap DKPBB & Co-Chair Informal Expert Group on WPS	Meningkatkan pengaruh Meksiko dalam perumusan resolusi DKPBB terkait perempuan dan perdamaian; menegaskan kepemimpinan Global South dalam diplomasi feminis (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2022).
	2021	Laporan Tahunan Pertama implementasi NAP 1325	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas implementasi FFP; menjadi contoh bagi negara lain, meski pelaksanaan masih terbatas pada tingkatan institusi tertentu (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2022).
	2022–2023	Peluncuran	Memperkuat peran Meksiko

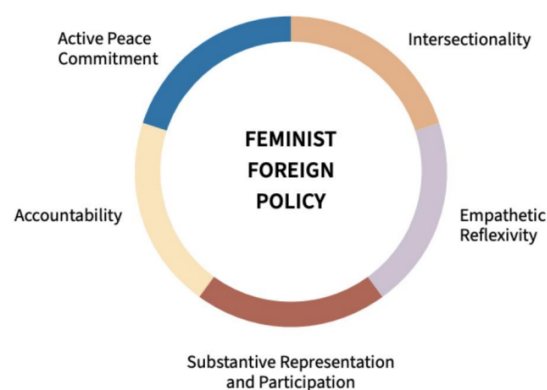
		Jaringan Ibero-Amerika Mediator Perempuan & inisiatif kerja sama regional gender	sebagai koordinator regional diplomasi damai berbasis gender, membangun kapasitas mediator perempuan di kawasan (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2023).
	Mei 2023	Peringkat ke-3 dalam Feminist Foreign Policy Index oleh ICRW	Validasi independen atas kemajuan FFP Meksiko, meningkatkan kredibilitas internasional dan membuka peluang kemitraan berbasis keadilan gender—meski memicu tuntutan penyesuaian domestik lebih lanjut (Papagiotti, 2023).
	Akhir 2023	Kementerian Luar Negeri menegaskan kembali FFP sebagai bagian dari “humanisme Meksiko”	Meneguhkan FFP sebagai pilar diplomasi jangka panjang; memperkuat narasi inklusif gender di forum global, tetapi tetap menghadapi kritik atas disparitas antara kebijakan luar negeri yang progresif dan situasi kekerasan gender domestik (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2023).

Tabel 2.1 *Timeline Perumusan Kebijakan Luar Negeri Meksiko 2018 - 2023*

Kebijakan Luar Negeri Feminis (FFP) Meksiko mulai diimplementasikan secara resmi pada Januari 2020, saat Kementerian Luar Negeri (Secretaría de Relaciones Exteriores/SRE) meluncurkan kebijakan tersebut dalam *31st Annual Meeting of Ambassadors and Consuls* di Mexico City. Inisiatif ini merupakan

tindak lanjut dari pernyataan Menteri Luar Negeri Marcelo Ebrard pada Sidang Umum PBB ke-74 pada September 2019, di mana ia menyatakan bahwa Meksiko akan mengadopsi pendekatan feminis sebagai prinsip utama diplomasi negaranya (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2023).

Motivasi utama di balik peluncuran FFP adalah keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen domestik terhadap kesetaraan gender dengan peran internasional Meksiko. Negara ini telah mengesahkan berbagai regulasi seperti *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia* (2007) dan reformasi “Paridad en Todo” (2019), yang mewajibkan keterwakilan perempuan secara setara dalam semua lembaga negara. FFP diposisikan sebagai alat untuk menciptakan konsistensi antara norma domestik dan praktik internasional, serta untuk memperkuat citra Meksiko sebagai negara progresif dalam isu hak perempuan (Gender Security Project, 2023).



sumber: (WILPF, 2021)

Gambar 2.4 Lima Pilar Utama Kebijakan Luar Negeri Feminis

Secara struktural, implementasi FFP dibangun melalui lima pilar utama: (1) integrasi perspektif gender dalam semua kebijakan luar negeri, (2) peningkatan paritas gender di dalam struktur diplomatik, (3) penciptaan lingkungan kerja bebas kekerasan berbasis gender di SRE, (4) visibilitas isu kesetaraan gender dalam komunikasi diplomatik, dan (5) pengarusutamaan feminisme dalam seluruh fungsi kementerian. Penerapannya dilakukan melalui pedoman internal, pelatihan anti kekerasan untuk staf diplomatik, serta kolaborasi strategis dengan badan-badan seperti UN Women dan Inmujeres untuk memastikan bahwa pendekatan feminis bukan hanya simbolis, tetapi juga operasional (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2023).

Dampak konkrit dari kebijakan ini mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Pada Juli 2024, Meksiko menjadi tuan rumah *Ministerial Conference on Feminist Foreign Policy*, konferensi internasional pertama tentang FFP yang diadakan di *Global South*, dihadiri lebih dari 40 negara. Acara ini memposisikan Meksiko sebagai pemimpin global dalam diplomasi berbasis gender. Dari tanggal 1-3 Juli 2024, Meksiko menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri ke-3 tentang Kebijakan Luar Negeri Feminis (FFP), setelah konferensi pertama di Jerman pada tahun 2022 dan yang kedua di Belanda pada tahun 2023. Konferensi tersebut diketuai oleh Menteri Luar Negeri, Alicia Barcena, yang menyerukan kepada negara-negara untuk “mengambil tindakan berani sehingga kesetaraan gender menjadi norma dan bukan pengecualian”. Konferensi tersebut diselenggarakan bersama oleh Kementerian Luar Negeri Meksiko, UNWOMEN dan Institut Perempuan Meksiko, INMUJERES, dan merupakan konferensi FFP

pertama yang diselenggarakan di belahan bumi selatan. Dari 50 negara anggota yang telah mendaftar, 39 mengirimkan perwakilan tingkat tinggi, termasuk di tingkat menteri, serta 100 perwakilan organisasi masyarakat sipil, termasuk direktur eksekutif kami Sascha Gabizon (Foreign Policy Collaborative, 2024).

Para penandatangan deklarasi berkomitmen pada 10 poin aksi FFP berikut:

1. Memajukan reformasi yang responsif gender, untuk membentuk kembali sistem keuangan dan ekonomi agar memprioritaskan keberlanjutan, keadilan iklim, dan perdamaian, serta mencapai ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan semua orang, khususnya mereka yang berada dalam situasi rentan (WECF, 2024);
2. Merancang kebijakan fiskal dan anggaran yang responsif gender yang menangani hak-hak semua perempuan, perempuan muda dan anak perempuan, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan (WECF, 2024);
3. Menegaskan peran penting perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, upaya mediasi dan pembangunan perdamaian, dan menekankan pentingnya partisipasi perempuan secara penuh, setara dan bermakna dalam semua upaya untuk memelihara dan mempromosikan perdamaian dan keamanan, serta perlunya meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pencegahan dan penyelesaian konflik (WECF, 2024);
4. Kemajuan dalam penghapusan kesenjangan digital gender, menjamin kesetaraan kesempatan, kondisi, dan perlakuan dalam akses, penggunaan,

dan penguasaan teknologi bagi perempuan, pemuda, dan anak perempuan, serta peningkatan keterampilan dan kepemimpinan perempuan dan penggabungan perspektif gender dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kerja sama digital serta pendekatan interseksi yang memungkinkan penghapusan bias diskriminatif dan menghasilkan sistem digital yang inklusif, bertanggung jawab, aman, dan transparan (WECF, 2024);

5. Melibatkan suara kaum muda dalam pengambilan keputusan, khususnya kaum muda perempuan dan anak perempuan, termasuk keikutsertaan mereka yang bermakna dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan luar negeri dan pembangunan dengan perspektif gender serta dengan pendekatan interseksional, antar generasi, antarbudaya, dan hak asasi manusia (WECF, 2024);
6. Mempromosikan, melalui kebijakan luar negeri, kondisi yang memungkinkan perempuan, perempuan muda, dan anak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh, bebas, dan efektif dalam kehidupan publik, serta untuk menetapkan kebijakan untuk memberantas stereotip gender, pola patriarki, dan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan seksual dan berbasis gender di depan umum dan kehidupan pribadi, daring dan luring, dengan menyoroti pentingnya mempromosikan kebijakan dan pendekatan global yang komprehensif berdasarkan hak asasi manusia yang mendukung pekerjaan layak, ekonomi perawatan, akses ke pendidikan dan kesetaraan gender (WECF, 2024);

7. Menggabungkan perspektif antarbudaya dan antar generasi dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan luar negeri feminis, serta komitmen lain yang terkait dengan pemajuan, perlindungan, dan jaminan hak-hak perempuan, perempuan muda, dan anak perempuan, serta keikutsertaan mereka secara penuh, bebas, dan efektif dalam kehidupan publik (WECF, 2024).
8. Mempromosikan kerjasama Selatan-Selatan dan kerja sama segitiga, serta tindakan multilateral yang mendukung penghapusan hambatan struktural berupa ketidaksetaraan gender, segala bentuk diskriminasi, dan kekerasan berbasis gender (WECF, 2024);
9. Membangun dan memperkuat mekanisme partisipasi, dukungan dan kolaborasi dengan masyarakat sipil, terutama organisasi perempuan dan feminis, pembela hak asasi manusia perempuan dan gerakan serta organisasi akar rumput, untuk perancangan, implementasi dan evaluasi perspektif gender dalam kebijakan luar negeri dan Kebijakan Luar Negeri Feminis, yang mempromosikan partisipasi signifikan pemuda dan integrasi mereka dalam proses pengambilan keputusan (WECF, 2024);
10. Melanjutkan kerja sama dan kolaborasi bersama dalam kerangka Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum-forum regional dan internasional lainnya serta berbagai inisiatif dalam konteks ini, untuk meningkatkan upaya kita menuju kesetaraan gender yang substantif, dengan menempatkan hak-hak dan partisipasi perempuan, perempuan muda, dan

anak perempuan di pusat, dalam kerangka KTT Masa Depan dan terutama dalam pelaksanaan Pakta untuk Masa Depan (WECF, 2024).

Selain itu, jumlah perempuan yang menjabat sebagai duta besar dan konsul meningkat dari 30% pada 2019 menjadi 45% pada 2024, menandai kemajuan dalam komitmen paritas gender di diplomasi. Tak hanya itu, alokasi anggaran untuk program kesetaraan gender di SRE meningkat sebesar 60% selama periode 2020–2023, digunakan untuk pelatihan internal dan proyek-proyek luar negeri yang berpihak pada pemberdayaan perempuan (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2023).

Secara domestik, adopsi Kebijakan Luar Negeri Feminis (FFP) oleh Pemerintah Meksiko muncul sebagai respons atas krisis kekerasan berbasis gender yang mencapai tingkat epidemik di dalam negeri. Statistik menunjukkan bahwa setiap hari terdapat rata-rata sembilan perempuan terbunuh (femicide) (Sanchez & Pesce, 2022), sementara hampir 70 % perempuan melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual selama hidup mereka (Reuters, 2022). Gelombang protes dan aksi massa sebagaimana terlihat dalam aksi pasar feminis menggambarkan kemarahan publik terhadap impunitas pelaku dan lambannya respons negara atas kasus-kasus tersebut (Barzallo, 2024). Dalam konteks ini, Pemerintah Meksiko memilih menjadikan feminisme bukan hanya isu domestik, tetapi juga prinsip panduan dalam diplomasi untuk menegaskan komitmen hak asasi perempuan di semua lini kebijakan.

Langkah ini juga dimotori oleh kebutuhan untuk mereformasi institusi domestik, khususnya Kementerian Luar Negeri (SRE). Melalui FFP, pemerintah menetapkan tujuan mencapai paritas gender di dalam struktur diplomatik, menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan berbasis gender, serta memperlihatkan kepemimpinan perempuan dalam forum internasional. Inisiatif-inisiatif seperti penataan ulang struktur organisasi, pelatihan anti-pelecehan, dan program peningkatan kapasitas diarahkan untuk menghilangkan hambatan struktural dan budaya yang selama ini menghalangi perempuan naik ke posisi puncak di tata kelola luar negeri (*Secretaría de Relaciones Exteriores* [SRE], 2023)

Di tingkat hukum, FFP melengkapi kerangka normatif nasional yang telah ada untuk menjamin kesetaraan gender dan melawan kekerasan terhadap perempuan. Sejak disahkannya *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia* pada 1 Februari 2007, pemerintah mengatur berbagai bentuk kekerasan dan mewajibkan koordinasi antar-pemerintah dalam pencegahan, penanganan, dan hukuman (*Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres* [CONAVIM], 2007). Selanjutnya, reformasi konstitusional “Paridad en Todo” tahun 2019 mewajibkan kesetaraan gender di semua lembaga publik, mendorong kenaikan signifikan representasi perempuan dalam kabinet dan lembaga legislatif (Bregel, 2024). Dengan demikian, Kebijakan Luar Negeri Feminis tidak hanya mencerminkan konsistensi antara norma domestik dan target internasional, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mempercepat implementasi prinsip-prinsip gender di semua level pemerintahan.

Selain itu, proyeksi FFP secara simbolis menyasar kredibilitas politik Presiden Andrés Manuel López Obrador yang kerap dianggap meremehkan kekerasan terhadap perempuan. Dengan mengusung FFP, pemerintahan mencoba menyeimbangkan citra reformis di luar negeri dengan tekanan domestik dari aktivis feminis agar pemerintah bertindak lebih tegas menangani kekerasan gender di dalam negeri. Dengan demikian, Kebijakan Luar Negeri Feminis bukan sekadar strategi diplomasi, melainkan instrumen domestik untuk mempercepat transformasi sosial dan institusional demi keadilan gender di seluruh tatanan kenegaraan Meksiko.

Di tengah dinamika tersebut, tantangan yang signifikan muncul dalam menangani masalah perdagangan manusia terhadap perempuan. Data menunjukkan bahwa wilayah perbatasan selatan, khususnya Tapachula, telah lama dikenal sebagai salah satu hotspot perdagangan manusia. Di wilayah ini, perempuan sering menjadi korban eksploitasi seksual dan kerja paksa, yang menimbulkan tekanan besar bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah penanggulangan. Pemerintah Meksiko telah mengimplementasikan inisiatif peningkatan patroli perbatasan dan kerja sama dengan lembaga internasional untuk memerangi perdagangan manusia, meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural seperti korupsi dan keterbatasan sumber daya (UNODC, 2020; Amnesty International, 2021).

2.2. Tapachula sebagai *Hotspot human trafficking*



sumber: (Vázquez, 2016)

Gambar 2.5 Rute Migrasi Amerika Tengah dan Meksiko Timur

Negara bagian selatan Chiapas dan Quintana Roo, yang dulunya hanya menjadi titik transisi bagi para imigran yang ingin mencapai perbatasan utara Meksiko, dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi tujuan yang diinginkan bagi para imigran yang ingin menetap di Meksiko. Para penjahat dan pengusaha di negara bagian ini menargetkan warga Amerika Tengah dengan berbagai kejahatan, mulai dari meminta bayaran hingga mengeksploitasi tenaga kerja murah mereka di bisnis perhotelan dan konstruksi. Seperti yang terlihat di gambar ini, para imigran Amerika Tengah memasuki Meksiko melalui beberapa titik-titik di sepanjang perbatasan (Vázquez, 2016).

Tidak ada rute khusus dan dinamika arus masuk terus berubah. Banyak migran Guatemala, khususnya anak perempuan dan wanita, memutuskan untuk tetap tinggal di kota Tapachula tepatnya di Chiapas alih-alih pindah ke utara. Kedekatan dengan Guatemala memudahkan mereka untuk mengunjungi dan mengirim uang kepada kerabat, dan kontrol perbatasan AS dan Meksiko yang lebih ketat dalam beberapa tahun terakhir, yang mempersulit migran untuk berhasil mencapai Amerika Serikat, merupakan faktor penentu (Vázquez, 2016).

Tapachula, yang terletak di perbatasan selatan Meksiko dekat dengan negara-negara miskin di Amerika Tengah, memiliki posisi strategis yang menjadikannya jalur utama bagi imigran ilegal. Letaknya yang strategis sebagai gerbang masuk ke Meksiko menyebabkan wilayah ini menjadi pintu transit bagi ribuan imigran yang melarikan diri dari kondisi ekonomi dan kekerasan di negara asal mereka (UNODC, 2020). Kondisi ini diperparah oleh perbedaan tingkat kesejahteraan antara negara-negara tetangga, di mana kemiskinan dan ketidakstabilan politik mendorong arus migrasi secara besar-besaran ke wilayah yang lebih aman, sekaligus memicu praktik perdagangan manusia yang merajalela (HRW, 2020).

Tapachula, yang terletak di negara bagian Chiapas, menjadi pintu gerbang utama bagi migrasi dari Amerika Tengah ke Meksiko, sehingga secara geografis menempati posisi strategis dalam jaringan perdagangan manusia. Berdasarkan data Instituto Nacional de Migración, setiap tahunnya lebih dari 140.000 migran tanpa dokumen memasuki wilayah Meksiko melalui Tapachula. Arus besar

migran ini menciptakan kondisi “massa kritis” di mana para penyelundup dan perekrut pelaku trafficking memanfaatkan kepanikan dan ketidakpastian para migran untuk menjual janji pekerjaan atau perlindungan, yang kemudian berujung pada eksploitasi seksual atau kerja paksa (Correa-Cabrera & Clark, 2016).

Sejak diberlakukannya Plan Frontera Sur pada 2014, otoritas Meksiko memperketat pengawasan militer dan kepolisian di jalur migrasi utama, yang secara paradoks justru memaksa migran memilih rute alternatif yang lebih berbahaya dan tidak resmi (Correa-Cabrera & Clark, 2016). Perempuan migran dengan keterbatasan sumber daya seringkali terjebak di Tapachula dalam waktu yang lebih lama, menunggu kesempatan untuk melanjutkan perjalanan atau mengumpulkan biaya. Dalam kondisi rentan ini, mereka mudah tergiur tawaran pekerjaan di “botaneros” atau bar-kecil yang menjanjikan pekerjaan sebagai pelayan atau penghibur, namun berujung pada praktik prostitusi paksa atau debt bondage.

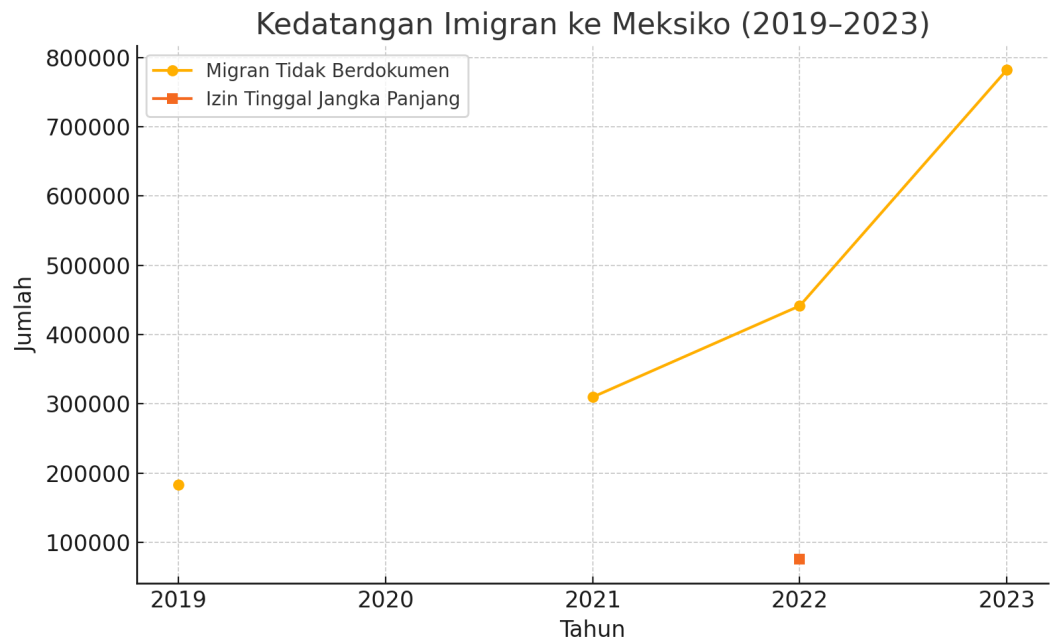
Lebih lanjut, lemahnya koordinasi dan korupsi di antara aparat penegak hukum di Tapachula memperburuk situasi, di mana kolusi antara pemilik bar dan petugas sering kali memudahkan operasi jaringan trafficking untuk menghindari razia (Correa-Cabrera & Clark, 2016). Bahkan fasilitas penahanan migran seperti Siglo XXI, yang seharusnya menjadi sarana identifikasi dan perlindungan korban, terkadang menjadi “pusaran balik” bagi para imigran yang tidak terdaftar sebagai korban trafficking dan dikembalikan ke tangan penyelundup (Correa-Cabrera & Clark, 2016). Kombinasi antara lokasi sebagai titik transit utama, kebijakan

perbatasan yang kontraproduktif, dan minimnya perlindungan institusional menjadikan Tapachula sebagai magnet bagi perdagangan perempuan migran.

Selain itu, Tapachula juga telah menjadi salah satu basecamp operasi kartel yang aktif menjalankan kegiatan kriminal. Wilayah ini menjadi markas bagi kartel-kartel yang menguasai jalur perdagangan gelap, di mana salah satunya adalah Kartel *del Istmo*. Kartel ini dikenal dominan di kawasan perbatasan, dengan basis kegiatan kriminal yang mencakup perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan perdagangan manusia (Amnesty International, 2021). Aktivitas kartel di Tapachula tidak hanya menciptakan kondisi keamanan yang rapuh, tetapi juga memfasilitasi jaringan perdagangan manusia, di mana perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban eksploitasi seksual dan kerja paksa.

Kondisi strategis Tapachula sebagai titik transit imigran yang berasal dari negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta eksistensi kartel yang mengoperasikan jaringan kriminalnya di wilayah tersebut, menjadikan kota ini sebagai hotspot human trafficking. Situasi ini menuntut adanya respons terkoordinasi antara pemerintah Meksiko, lembaga internasional, dan organisasi kemanusiaan untuk memerangi perdagangan manusia dan mengembalikan kondisi keamanan serta keadilan sosial di wilayah tersebut (Gobierno de México, 2020; UNODC, 2020).

2.3. Signifikansi *women immigrants* dalam kasus perdagangan manusia di Meksiko

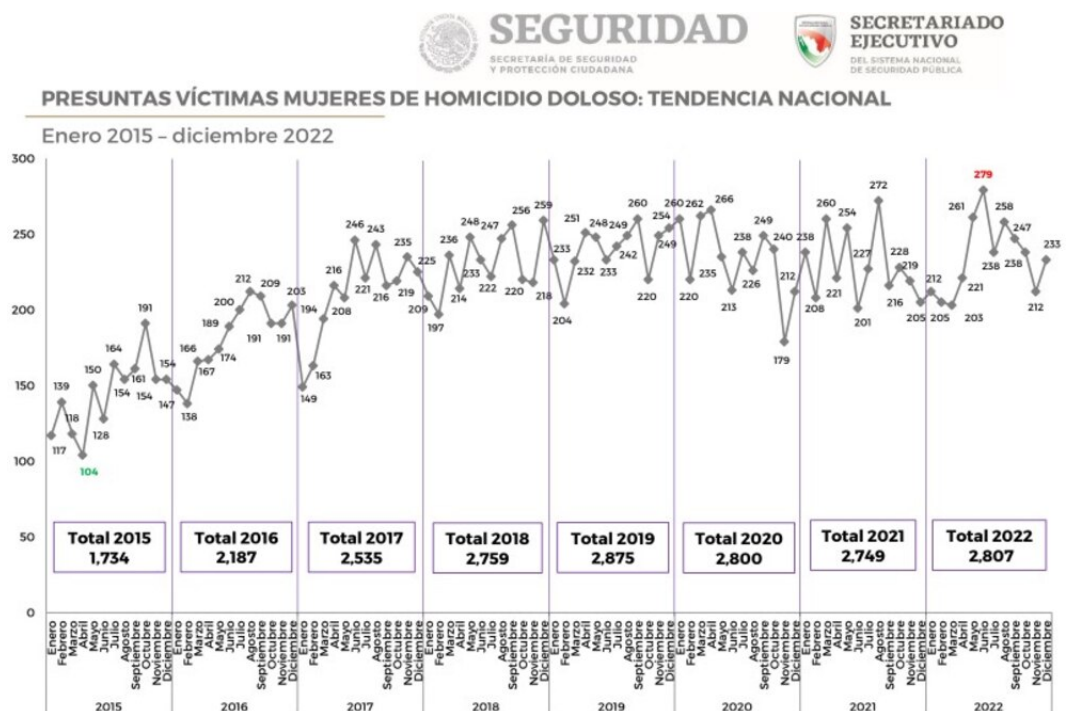


sumber: (IOM, 2024)

Gambar 2.6 Data Imigrasi ke Meksiko (2019–2023)

Grafik di atas memperlihatkan bahwa jumlah migran tidak berdokumen yang tercatat oleh otoritas Meksiko mengalami peningkatan tajam dari 182.940 pada tahun 2019 menjadi 309.692 pada 2021, kemudian naik lagi menjadi 441.409 pada 2022, dan mencapai 782.176 pada 2023 (IOM, 2024). Lonjakan ini mencerminkan arus migrasi yang semakin besar, dipicu oleh kondisi di negara asal dan pergeseran rute migrasi setelah kebijakan seperti *Feminist Foreign Policy* diterapkan.

Sementara itu, izin tinggal jangka panjang baru dilaporkan pada tahun 2022, dengan 76.000 izin yang diberikan (OECD, 2023). Ini menunjukkan bahwa meski sebagian besar imigran tetap berstatus tidak berdokumen, terdapat upaya resmi untuk mengatur status sebagian migran melalui pemberian izin tinggal.



sumber: (Secretariado Ejecutivo, 2022)

Gambar 2.7 Data Pembunuhan Perempuan Yang Disengaja di Meksiko
dari tahun 2015 - 2022

Menurut Sekretariat Eksekutif Sistem Keamanan Publik Nasional (SESNSP), dalam 12 bulan tahun 2022, terdapat 3.754 kematian perempuan, yang mana hanya 947 (atau 33,7%) yang diselidiki sebagai pembunuhan terhadap

perempuan (*Femicida*), sedangkan sisanya dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja (*Intentional Homicide*). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata sepuluh wanita yang dibunuh per hari di Meksiko di bawah pemerintahan Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pada masa jabatan tahun 2018 - 2022 (SESNSP, 2022).

Laporan nasional SESNSP menunjukkan bahwa 2.807 wanita meninggal karena pembunuhan yang disengaja pada tahun 2022, menjadikan tahun itu tahun kedua dengan jumlah korban kejahatan ini tertinggi setelah tahun 2019, yang ditutup dengan 2.875 (SESNSP, 2022).

Secara spesifik, masing-masing dari dua belas bulan tahun 2022 mencatat lebih dari 200 pembunuhan terhadap wanita: dengan 279 korban, Juni bukan hanya yang paling mematikan tahun itu dan di masa Obradorato, tetapi juga yang paling kejam sejak Sekretariat mulai menyimpan catatan, yaitu sejak 2015. Dengan ini, pada bulan keenam tahun 2022 telah melampaui rekor tertinggi 272 korban perempuan pembunuhan yang disengaja yang sebelumnya tercatat pada bulan Agustus 2021. Mengenai distribusi kasus menurut negara bagian, lembaga tersebut melaporkan bahwa Guanajuato melaporkan pembunuhan berencana terhadap perempuan terbanyak, dengan 413 kasus, diikuti oleh Baja California (276), Negara Bagian Meksiko (269), dan Michoacán (232). Penting untuk dicatat bahwa keempat negara bagian ini juga muncul, dalam urutan yang sama, di antara enam negara bagian paling kejam di Meksiko, menurut Kementerian Keamanan dan Perlindungan Publik (SSPC) (SESNSP, 2022).

Sepertiga dari kematian perempuan yang dilaporkan pada tahun 2022 telah diselidiki sebagai dugaan femisida, jumlah yang sama dengan yang dilaporkan pada tahun 2020. Artinya, kedua periode tersebut memiliki jumlah korban pembunuhan terhadap perempuan tertinggi kedua yang tercatat dalam pemerintahan saat ini, karena yang pertama terjadi pada tahun 2021, yakni sebanyak 980 kasus, dan yang terendah terjadi pada tahun 2019, yakni sebanyak 943 kasus. Dan meskipun jumlah bulannya tetap dalam kisaran rata-rata yang dikelola sepanjang pemerintahan (kira-kira antara 60 dan 90 kasus), dan bahkan mencatat penurunan yang cukup besar dari Juni hingga Juli, dari 93 menjadi 59 kasus, perbandingan akumulasi tahunan akan menunjukkan bahwa strategi Federal dan Negara Bagian hanya berhasil mengendalikan, tetapi tidak mulai mengurangi, kematian terkait gender yang merenggut nyawa 10 wanita setiap hari (SESNSP, 2022).

Fakta yang mengkhawatirkan, mengingat bahwa setidaknya dua orang perempuan menjadi korban pembunuhan terhadap perempuan dan tujuh orang menjadi korban pembunuhan yang disengaja setiap harinya ; ini hanya jika mempertimbangkan jumlah terendah dari setiap kejahatan yang tercatat per bulan pada tahun 2022. Jika dirata-ratakan menurut angka tertinggi, maka akan ada sembilan pembunuhan yang disengaja dan tiga orang menjadi korban pembunuhan terhadap perempuan, yaitu, 12 orang perempuan dibunuh setiap harinya. Dalam hal ini, Negara Bagian Meksiko sekali lagi menempati peringkat sebagai negara bagian dengan tingkat kejahatan tertinggi dalam hal pembunuhan terhadap perempuan, dengan 138 kasus yang dilaporkan pada tahun 2022. Diikuti

oleh Nuevo León dengan 102 kasus, Mexico City dengan 73 kasus , dan Veracruz dengan 68 kasus (SESNSP, 2022).

Perempuan sebagai imigran memegang peran sentral dalam wacana hak asasi manusia karena hak-hak mereka sebagai manusia merupakan hak fundamental yang diakui dalam kerangka Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen HAM internasional lainnya (IACHR, 2019). Konsep sekuritisasi dalam konteks migrasi menyoroti perlunya perlindungan yang lebih spesifik terhadap perempuan, mengingat mereka rentan serta sering menjadi korban pelanggaran HAM dan kekerasan struktural dalam proses migrasi. Dalam forum PBB dan lembaga internasional, isu-isu mengenai perlindungan hak-hak perempuan imigran terus diangkat sebagai bagian dari agenda global untuk menjamin keadilan dan keamanan, sekaligus mendesak negara-negara untuk mengimplementasikan mekanisme perlindungan yang lebih efektif (Amnesty International, 2021).

Dampak keberadaan perempuan imigran terhadap negara-negara sekitar Meksiko juga signifikan. Keberadaan mereka tidak hanya membawa dinamika demografis, tetapi juga turut menambah tekanan pada sistem sosial dan layanan publik di negara-negara tujuan, terutama dalam hal penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta tantangan integrasi sosial (UNODC, 2020). Dampak ini menuntut respons kebijakan yang holistik dan humanis, yang dapat mengakomodasi kebutuhan serta melindungi hak-hak perempuan imigran.

Kerentanan perempuan imigran disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi ekonomi yang tidak stabil di negara asal, kekerasan gender, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Banyak perempuan memutuskan untuk bermigrasi ke Amerika Serikat karena harapan akan kehidupan yang lebih aman dan peluang ekonomi yang lebih baik, meskipun perjalanan tersebut sering diwarnai dengan risiko eksploitasi dan penyalahgunaan. Kurangnya dukungan dari negara asal dan terbatasnya jaringan perlindungan di negara tujuan membuat mereka rentan terhadap perdagangan manusia dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (HRW, 2020; Amnesty International, 2021). Oleh karena itu, upaya internasional untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada perempuan imigran menjadi krusial dalam menghadapi berbagai tantangan global terkait migrasi dan HAM.

2.4. *Blueprint* Meksiko dalam kebijakan penanganan *Women Immigrant Trafficking*

Sejak awal masa jabatannya pada Desember 2018, Presiden Andrés Manuel López Obrador (AMLO) menunjukkan komitmen terhadap isu perlindungan migran, termasuk perempuan migran yang menjadi korban perdagangan manusia (*trafficking*). Salah satu langkah awal yang diambil oleh pemerintah Meksiko adalah bergabung dalam *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, sebuah inisiatif global di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menekankan perlindungan hak asasi migran, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Secara kelembagaan, Pemerintah Meksiko melalui Instituto Nacional de Migración (INM) telah meningkatkan kapasitas identifikasi korban trafficking selama periode 2018 hingga pertengahan 2023. Berdasarkan data resmi, sebanyak 160 migran telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, di mana 89 di antaranya adalah perempuan yang dieksploitasi secara seksual, dan 11 lainnya menjadi korban kerja paksa. Tindak lanjut dari identifikasi ini mencakup pengembalian aman (*retorno asistido*) bagi sebagian korban ke negara asal mereka, serta pemberian izin tinggal bersifat kemanusiaan bagi korban yang memilih bertahan di Meksiko. Contohnya, pada tahun 2019, INM berhasil menyelamatkan 24 perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual oleh jaringan kriminal lintas negara (Gobierno de México, 2023a).

Untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam memerangi perdagangan orang, Pemerintah Meksiko mengaktifkan kembali dan memperkuat peran *Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas* (SVET) di bawah Kementerian Dalam Negeri (*Secretaría de Gobernación/SEGOB*). SVET bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan jaringan nasional anti perdagangan orang (*Redes VET*) yang tersebar di 23 negara bagian. Lembaga ini juga melaksanakan pelatihan lintas sektor dan kampanye pencegahan publik yang berbasis pada kesetaraan gender dan pendekatan budaya yang peka terhadap kelompok migran (Gobierno de México, 2023b).

Dalam ranah kebijakan nasional, pemerintah melanjutkan pelaksanaan *Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia*

de Trata de Personas, sebuah kerangka kerja jangka menengah yang meliputi aspek pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan pemantauan kebijakan. Program ini diperbarui secara berkala dan melibatkan berbagai aktor, termasuk lembaga penegak hukum, kejaksaan, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuan utamanya adalah menciptakan respons sistemik terhadap berbagai bentuk perdagangan manusia dengan integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender (SEGOB, 2020).

Seiring meningkatnya kompleksitas jaringan kriminal yang memanfaatkan jalur migrasi, Pemerintah Meksiko menjalin kerja sama lebih erat dengan organisasi internasional, seperti Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Pada tahun 2023, diluncurkan *Estrategia Nacional de Combate al Tráfico Ilícito de Personas Migrantes con Perspectiva de Género 2023–2025*. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan migrasi dan penegakan hukum tidak bersifat netral gender, melainkan responsif terhadap kerentanan spesifik yang dihadapi perempuan migran. Strategi ini juga mendorong partisipasi perempuan migran dalam perumusan kebijakan serta memperkuat protokol identifikasi korban di titik-titik transit utama seperti Chiapas dan Tapachula (IOM, 2023).

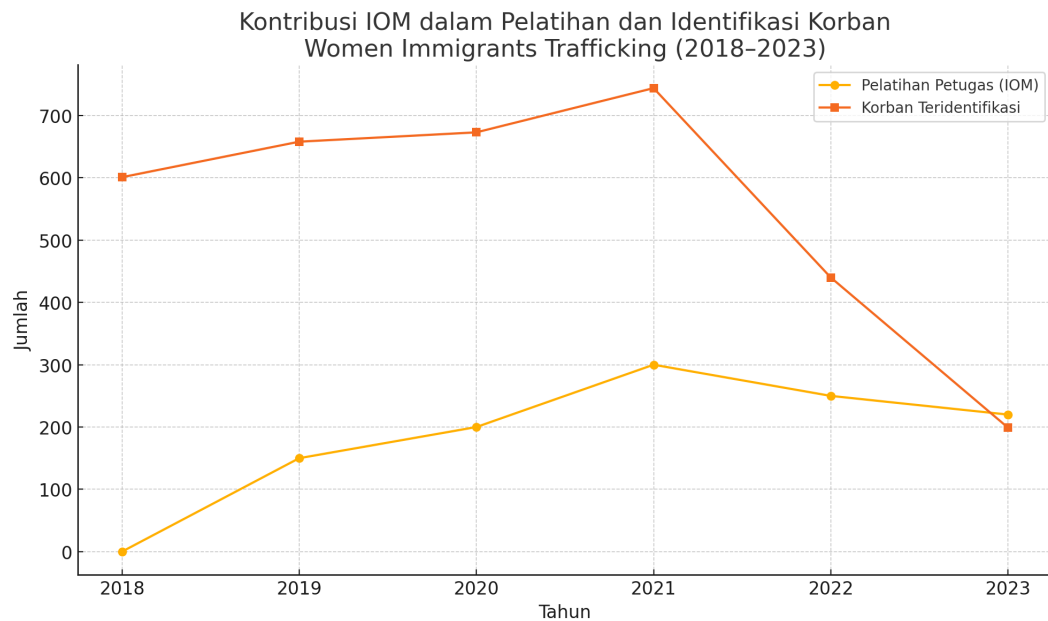
Selain kebijakan dan struktur kelembagaan, Pemerintah Meksiko juga fokus pada pelatihan dan peningkatan kapasitas para aktor terkait. Data dari SVET menunjukkan bahwa selama periode 2019 hingga 2023, lebih dari 280 orang yang terdiri dari petugas imigrasi, polisi, jaksa, dan anggota LSM telah menerima

pelatihan tentang identifikasi dan penanganan korban perdagangan orang, dengan penekanan pada eksploitasi perempuan migran. Pelatihan ini dirancang untuk menghapuskan praktik diskriminatif serta membekali aparat dengan pemahaman akan konteks sosial dan budaya para korban (Gobierno de México, 2023b).

Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi. Laporan tahunan *Trafficking in Persons* dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara konsisten menempatkan Meksiko pada kategori Tier 2 selama masa pemerintahan AMLO. Ini menunjukkan bahwa meskipun Meksiko telah melakukan sejumlah upaya signifikan, negara tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang, terutama dalam hal pencegahan impunitas dan peningkatan jumlah penuntutan terhadap pelaku. Selain itu, masih terdapat celah dalam koordinasi antar lembaga serta perlindungan jangka panjang bagi korban perempuan migran (U.S. Department of State, 2023).

2.5. *International Organization for Migration (IOM)* dalam FFP

Meksiko



sumber: (IOM, 2023)

Gambar 2.8 Data kontribusi IOM dalam Pelatihan dan Identifikasi korban *Women Immigrants Trafficking* di Meksiko selama periode 2018–2023

Pada tahun 2019, International Organization for Migration (IOM) mengambil inisiatif strategis dengan menggandeng UN Women untuk menyusun dan menerapkan *Gender-Responsive Migration Governance Toolkit*, yang diterjemahkan ke dalam *Protocolo Nacional de Detección e Identificación de Víctimas de Trata de Personas Migrantes* di Meksiko (IOM & UN Women, 2020). Protokol ini memuat panduan operasional menyeluruh yang dimana mulai dari langkah pra-skrining di pos-pos imigrasi hingga mekanisme rujukan cepat

bagi perempuan migran yang terindikasi sebagai korban trafficking, dengan menekankan pendekatan *trauma-informed* dan sensitivitas gender. Adopsi protokol tersebut mengharuskan pelibatan multi-sektor: dari *Instituto Nacional de Migración* (INM) hingga aparat kepolisian dan LSM feminis, sehingga kerangka normatif internasional dapat diinternasionalkan menjadi instrumen kebijakan luar negeri Meksiko di bawah payung Feminist Foreign Policy (FFP) (IOM, 2019).

Seiring dengan peluncuran protokol, IOM memfokuskan upaya *capacity building*. Berdasarkan data internal bersama UN Women, pada 2019 IOM menyelenggarakan sekitar 150 sesi pelatihan bagi petugas imigrasi, polisi perbatasan, dan diplomat Kementerian Luar Negeri (SRE). Jumlah ini meningkat menjadi 200 sesi pada 2020 dan memuncak di 300 sesi pada 2021, yang melibatkan lebih dari 1.200 personel lintas lembaga (IOM, 2021). Pelatihan mencakup teknik wawancara korban, identifikasi pola eksploitasi seksual dan kerja paksa, serta prosedur rujukan multidisiplin. Hasil nyata dari investasi ini terlihat pada kenaikan angka identifikasi korban trafficking perempuan migran: dari 658 kasus pada 2019 menjadi 744 kasus pada 2021 (IOM, 2021). Korelasi positif antara jumlah sesi pelatihan dan korban teridentifikasi memperlihatkan bahwa peningkatan kapabilitas teknis aparat secara langsung mempengaruhi efektivitas FFP Meksiko di lapangan.

Memasuki fase pasca-pandemi, dinamika sedikit berubah: sesi pelatihan IOM menurun menjadi 250 pada 2022 dan 220 pada 2023 sesuai penyesuaian anggaran dan prioritas kebijakan. Demikian pula, jumlah korban teridentifikasi

menurun menjadi 440 kasus pada 2022 dan 199 kasus pada 2023, walaupun angka penurunan ini lebih mencerminkan perubahan metode pelaporan serta fokus pada layanan pemulihan daripada keberhasilan menekan kasus trafficking secara absolut (IOM, 2022). Meski demikian, IOM memastikan adanya *gender focal points* di semua 32 pos transit migran utama dari Tapachula hingga Ciudad Juárez sebagai bentuk komitmen berkelanjutan. Kehadiran *focal points* ini memperkuat sinergi antara aparat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional dalam menjalankan prinsip FFP secara konsisten.